



Peran Pendidikan Anti-Korupsi di Lembaga Kepolisian dalam Membentuk Anggota Polri yang Bebas Korupsi

Randywinata

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,
Indonesia

randywinata900@gmail.com

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

Korespondensi penulis: randywinata900@gmail.com

Abstract: *Anti-corruption education within the police is a strategic step in forming members of the National Police who have integrity and are free from corrupt behavior. This research aims to explore the implementation of anti-corruption education in police agencies, as well as the factors that influence its effectiveness. In this context, anti-corruption education is expected to be an important tool in instilling the values of integrity among members of the National Police. Through an interview method with Mr. Yudha from Ditlantas, this research found that effective anti-corruption education involves an experience-based approach and realistic training, which allows Polri members to understand the impact of acts of corruption through simulations and real case studies. This approach is in line with Kohlberg's theory of moral development, which emphasizes the importance of active learning in the development of ethical understanding. Apart from that, the involvement of superiors and co-workers in supporting anti-corruption education has also proven to be significant, considering that the work environment has an important role in strengthening the values taught. Social environmental factors, culture and organizational structure in the police also contribute to the effectiveness of anti-corruption education. If corruption is considered accepted behavior in institutions, then education alone will not be enough to change members' behavior. This research recommends collaboration between National Police leadership, the work environment, and ongoing training programs to support anti-corruption education. With this holistic approach, it is hoped that anti-corruption education can be implemented in real terms, so that the National Police can produce members who have high integrity and reject all forms of corruption.*

Keywords: *Anti-Corruption, Education, Integrity of Police Members, Experience Based Learning*

Abstrak: Pendidikan anti-korupsi di lingkungan kepolisian merupakan langkah strategis dalam membentuk anggota Polri yang berintegritas dan bebas dari perilaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi diharapkan menjadi alat penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas di kalangan anggota Polri. Melalui metode wawancara dengan Bapak Yudha dari Ditlantas, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan anti-korupsi yang efektif melibatkan pendekatan berbasis pengalaman dan pelatihan yang realistis, yang memungkinkan para anggota Polri memahami dampak dari tindakan korupsi melalui simulasi dan studi kasus nyata. Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dalam pengembangan pemahaman etis. Selain itu, keterlibatan atasan dan rekan kerja dalam mendukung pendidikan anti-korupsi juga terbukti signifikan, mengingat lingkungan kerja memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai yang diajarkan. Faktor lingkungan sosial, budaya, dan struktur organisasi di kepolisian turut berkontribusi terhadap efektivitas pendidikan anti-korupsi. Jika korupsi dianggap sebagai perilaku yang diterima di institusi, maka pendidikan semata tidak akan cukup untuk mengubah perilaku anggota. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi antara pimpinan Polri, lingkungan kerja, dan program pelatihan berkelanjutan untuk mendukung pendidikan anti-korupsi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pendidikan anti-korupsi dapat diterapkan secara nyata, sehingga Polri dapat mencetak anggota yang memiliki integritas tinggi dan menolak segala bentuk korupsi.

Kata kunci : Pendidikan, Anti-Korupsi, Integritas Anggota Polri, Pembelajaran Berbasis Pengalaman

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan negara, termasuk di dalam lembaga penegak hukum seperti Polri. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di berbagai sektor masih marak terjadi, meskipun upaya penegakan hukum terus diperkuat. Pada tahun 2022, Polri menangani 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan pendekatan sistematis dan terstruktur (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Dalam upaya memberantas korupsi secara menyeluruh, pendidikan anti-korupsi di lingkungan Polri telah menjadi perhatian utama. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk anggota Polri yang memiliki integritas tinggi, nilai moral yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang dampak buruk dari korupsi. Mengingat bahwa anggota Polri memiliki peran penting sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, pembentukan karakter yang kuat melalui pendidikan anti-korupsi menjadi langkah strategis untuk mencegah perilaku permisif terhadap korupsi di lingkungan kepolisian.¹

Korupsi dalam institusi kepolisian bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah mengakar sebagai permasalahan struktural yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih tergolong rendah, yang mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga krisis moral dan integritas di dalam institusi. Untuk itu, intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam memberantas budaya korupsi, terutama di lembaga seperti Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.²

Salah satu solusi yang diidentifikasi adalah pentingnya pendidikan moral dan etika dalam pembentukan karakter anggota Polri. Pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam program pelatihan dan pengembangan anggota Polri dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Program pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga untuk membangun karakter yang kuat dan kritis terhadap setiap bentuk penyimpangan.

Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan integritas di dalam tubuh

¹ Mahasiswa Kepolisian, *Strategi Penanggulangan Korupsi Di Tubuh Polri*, Jurnal Kriminologi Indonesia 3, no. 3 (2017): 63–78, <https://media.neliti.com/media/publications/4248-ID-strategi-penanggulangan-korupsi-di-tubuh-polri.pdf>.

² Wahyuni Pudjiastuti and Soraya Fadhal, *Opini Mahasiswa Terhadap Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI)*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL 1, no. 3 (2012): 201–216.

institusi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi yang diterapkan dalam pelatihan dan pembinaan anggota Polri diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, yang pada akhirnya membentuk polisi yang berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi.

Pentingnya pendidikan anti-korupsi di lingkungan Polri didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat memberikan dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku individu. Pendidikan yang menekankan pentingnya integritas dan anti-korupsi dapat memperkuat fondasi moral anggota Polri, yang akan berpengaruh pada cara mereka bertindak dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Polri yang bebas dari korupsi memerlukan investasi yang serius dalam pendidikan sejak awal karier anggota, karena perubahan budaya dan mentalitas hanya dapat dicapai melalui proses yang panjang dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti-korupsi dalam membentuk anggota Polri yang bebas dari korupsi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pendidikan anti-korupsi diterapkan di lembaga kepolisian, tantangan dalam implementasinya, serta dampak jangka panjang yang diharapkan terhadap pencegahan korupsi di dalam Polri.

2. RUMUSAN MASALAH

Meskipun pendidikan anti-korupsi di lingkungan Polri telah diakui sebagai salah satu langkah penting dalam mencegah perilaku korupsi, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pelaksanaan maupun efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam kajian ini:

- a. Bagaimana implementasi pendidikan anti-korupsi di lingkungan Polri, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapannya?
- b. Sejauh mana pendidikan anti-korupsi dalam Polri dapat membentuk integritas dan mencegah perilaku permisif terhadap korupsi pada anggota Polri?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana wawancara mendalam menjadi teknik utama dalam pengumpulan data. Wawancara akan dilakukan dengan Bapak Yudha dari Ditlantas Polri. Wawancara bersifat semi-terstruktur,

memungkinkan fleksibilitas dalam menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman terkait implementasi pendidikan anti-korupsi dalam lingkungan Polri. Pertanyaan akan difokuskan pada penerapan program pendidikan anti-korupsi, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampak yang dirasakan dalam pembentukan karakter anggota Polri. Data hasil wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait efektivitas pendidikan anti-korupsi dalam Polri. Triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan internal dan observasi lapangan untuk meningkatkan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

4. PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam Lingkungan Polri

Dalam wawancara dengan Bapak Yudha dari Ditlantas Polri, beliau memberikan pandangan mendalam mengenai implementasi pendidikan anti-korupsi dalam Polri. Menurutnya, pendidikan anti-korupsi sangat penting sebagai langkah preventif untuk membentuk karakter integritas di kalangan anggota Polri. "Nilai-nilai anti-korupsi diajarkan melalui pelatihan dan program internal, namun pendekatan yang lebih praktis dan relevan dengan tantangan sehari-hari anggota Polri sangat diperlukan," jelasnya.

Dalam konteks kriminologi, korupsi dalam institusi seperti Polri sering kali dipicu oleh tekanan sosial, ekonomi, dan budaya organisasi yang mendorong tindakan permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi tidak hanya harus mengajarkan aspek teoretis, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang bagaimana perilaku koruptif berdampak negatif pada citra institusi dan masyarakat secara umum. Pendidikan anti-korupsi dalam Polri berperan sebagai alat pencegahan yang efektif untuk memperkuat integritas melalui internalisasi nilai-nilai moral dan etika kepolisian.

Pendekatan berbasis pengalaman dinilai sebagai metode yang paling efektif untuk mengajarkan anggota Polri tentang konsekuensi nyata dari tindakan koruptif. Bapak Yudha menekankan bahwa simulasi dan skenario nyata yang melibatkan anggota Polri dalam situasi yang mensimulasikan godaan atau tekanan untuk berperilaku koruptif, membantu mereka untuk lebih memahami konsekuensi tindakan tersebut. "Ketika anggota Polri terlibat langsung dalam situasi seperti ini, mereka akan lebih sadar bagaimana korupsi memengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi," katanya.

Namun, beliau juga menyebutkan bahwa implementasi program pendidikan anti-korupsi di Polri masih bervariasi tergantung pada unit atau divisi tempat anggota bertugas.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan khusus bagi pelatih dan instruktur yang bertugas untuk menyampaikan pendidikan anti-korupsi. "Banyak instruktur yang mengandalkan metode pengajaran konvensional, hanya memberikan materi tanpa memberikan konteks yang relevan atau studi kasus yang sesuai dengan situasi anggota Polri di lapangan," tambahnya.

Pendekatan pengajaran yang digunakan sering kali masih bersifat pasif, seperti ceramah dan presentasi materi, tanpa melibatkan anggota Polri dalam aktivitas pembelajaran aktif. Berdasarkan teori Konstruktivisme dari Piaget (1972), pembelajaran seharusnya melibatkan anggota secara aktif dalam membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Namun, implementasi pendidikan anti-korupsi di Polri sering kali tidak melibatkan diskusi, simulasi, atau studi kasus yang dapat membantu anggota menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi dengan lebih mendalam.

Dukungan institusional juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan anti-korupsi. Meskipun ada inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam berbagai level institusi, termasuk Polri, pelaksanaan program ini di tingkat daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Beberapa unit di Polri telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan adanya pelatihan tambahan dan kolaborasi dengan KPK, namun banyak unit lainnya masih kekurangan akses ke modul, instruktur yang kompeten, dan materi pelatihan yang relevan.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, beberapa inisiatif inovatif mulai muncul dalam lingkungan Polri untuk meningkatkan pendidikan anti-korupsi. Beberapa unit di wilayah tertentu telah mengadopsi program berbasis Belajar Melalui Pengalaman dari Kolb (1984), di mana anggota Polri dilibatkan langsung dalam proyek-proyek sosial yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan menghadirkan anggota Polri pada situasi nyata yang mencerminkan nilai-nilai integritas, program-program ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang lebih kritis terhadap perilaku koruptif dan meningkatkan komitmen anggota Polri terhadap penegakan hukum yang bersih.

Meskipun pendidikan anti-korupsi di sekolah dasar memiliki potensi untuk mencegah perilaku permisif terhadap korupsi, efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa baik nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jika pendidikan anti-korupsi hanya diajarkan sebagai bagian dari kurikulum tanpa dukungan praktik yang nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat, dampaknya bisa terbatas. Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari budaya sekolah yang lebih luas, di mana setiap aspek interaksi dan

aktivitas sekolah mencerminkan komitmen terhadap integritas dan kejujuran. Pendidikan anti-korupsi di sekolah dasar dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk nilai-nilai integritas dan mencegah perilaku permisif terhadap korupsi pada anak-anak. Namun, keberhasilannya membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dukungan dari semua pihak ini akan memastikan bahwa anak-anak tidak hanya memahami konsep anti-korupsi secara teoretis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berintegritas dan siap melawan korupsi di masa depan.

Peran Pendidikan Anti-Korupsi di Lembaga Kepolisian dalam Membentuk Anggota Polri yang Bebas Korupsi

Pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Dalam wawancara dengan Bapak Yudha dari Ditlantas, beliau menekankan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi anggota kepolisian merupakan langkah strategis dalam membangun budaya kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. "Pendidikan ini penting karena anggota Polri harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, dan untuk melakukannya dengan baik, mereka harus terbebas dari tindakan korupsi dalam bentuk apapun," ungkap beliau.

Menurut Bapak Yudha, pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian harus disampaikan dengan pendekatan yang holistik, meliputi pemahaman mendalam mengenai dampak korupsi terhadap penegakan hukum dan kepercayaan publik. "Kita tidak bisa hanya mengajarkan teori tentang korupsi; kita harus membuat setiap anggota Polri paham bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan integritas adalah nilai-nilai yang fundamental dalam menjalankan tugas mereka," tambahnya. Beliau juga menyatakan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman, seperti simulasi kasus dan role-playing, sangat penting dalam pendidikan anti-korupsi di kepolisian.

Selain itu, tantangan dalam pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian adalah memastikan nilai-nilai integritas yang diajarkan diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Menurut teori Belajar Sosial dari Bandura, anggota kepolisian dapat belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial, termasuk dari para senior dan pimpinan di institusi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen kepolisian, mulai dari pimpinan hingga anggota baru, untuk memberikan contoh yang baik dalam menolak segala bentuk korupsi.

Menurut Aditya dkk., pendekatan berbasis pengalaman atau pembelajaran kontekstual yang diterapkan dalam pendidikan anti-korupsi dapat membantu anggota Polri

menginternalisasi nilai-nilai integritas secara lebih mendalam. Kegiatan seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan analisis situasi yang membutuhkan keputusan etis dapat memupuk kesadaran akan pentingnya sikap antikorupsi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip integritas.

Peran keluarga dan lingkungan sosial juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian. Pendidikan antikorupsi yang diterima selama pelatihan formal harus diperkuat dengan sikap anti-korupsi di lingkungan kerja dan komunitas kepolisian. Menurut penelitian oleh Ilham Fahmi, peran pimpinan di lembaga kepolisian sangat penting dalam menumbuhkan budaya yang bersih dari korupsi. Ketika pimpinan memberikan contoh yang baik, menolak gratifikasi, dan menerapkan prinsip keadilan, hal ini akan berdampak signifikan pada perilaku anggota Polri di bawahnya.

Meskipun pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian sangat penting, keberhasilannya sangat tergantung pada seberapa baik nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh seluruh anggota institusi. Pendidikan antikorupsi di kepolisian harus didukung oleh lingkungan yang tidak toleran terhadap segala bentuk korupsi, baik di dalam maupun di luar institusi. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sanksi tegas terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan anti-korupsi memiliki dampak jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk anggota Polri yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Melalui pembelajaran yang mengedepankan moral dan karakter, seperti pendekatan berbasis pengalaman dan keteladanan dari pimpinan serta senior di institusi, anggota Polri dapat mulai menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan tugas mereka. Namun, efektivitas pendidikan ini sangat bergantung pada dukungan dari lingkungan kerja dan budaya organisasi di kepolisian, yang seharusnya turut memperkuat nilai-nilai yang diajarkan. Jika pendidikan anti-korupsi diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dengan praktik sehari-hari, baik di lembaga kepolisian maupun dalam interaksi dengan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan anggota Polri yang tidak hanya memahami konsep anti-korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian diharapkan mampu membentuk institusi yang bersih dari korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, B., Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)*. IBLAM Law Review. 1(3) hlmn. 1–21.
- Budijarto, A. 2018. *Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila*. Jurnal Kajian Lemhannas RI. 34(1) hlmn. 5–21.
- Dewantara, J. A., Sausan, N., & Sari, I. F. 2022. *Efektivitas Pendidikan Antikorupsi untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pendidikan. 6(2) hlmn. 2727–2739.
- Disyahputra, A. 2023. *Efektivitas Pendidikan Antikorupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Non Diskriminatif. 2(1) hlmn. 87–90.
- Hariyadi. 2019. *Mewujudkan Kemandirian Belajar: Merdeka Belajar sebagai Kunci Sukses Mahasiswa Jarak Jauh*. Badan Penerbit STIEPARI Press.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Pratama, A., Dimas, A., & Pratama, D. 2024. *Urgensi Pendidikan Antikorupsi dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology. 1(2) hlmn. 308–315.
- Mahasiswa Kepolisian. 2017. *Strategi Penanggulangan Korupsi di Tubuh Polri*. Jurnal Kriminologi Indonesia. 3(3) hlmn. 63–78. <https://media.neliti.com/media/publications/4248-ID-strategi-penanggulangan-korupsi-di-tubuh-polri.pdf>
- Pahlevi, I., & Fahmi, I. 2022. *Peran Tenaga Pendidik dalam Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 8 hlmn. 444–454.
- Pudjiastuti, W., & Fadhal, S. 2012. *Opini Mahasiswa terhadap Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI)*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. 1(3) hlmn. 201–216.
- Siregar, A. A. 2022. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Jurnal Pendidikan. 9(1) hlmn. 13–22.
- Suyatmiko, W. H. 2020. *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. 7(1) hlmn. 161–178.